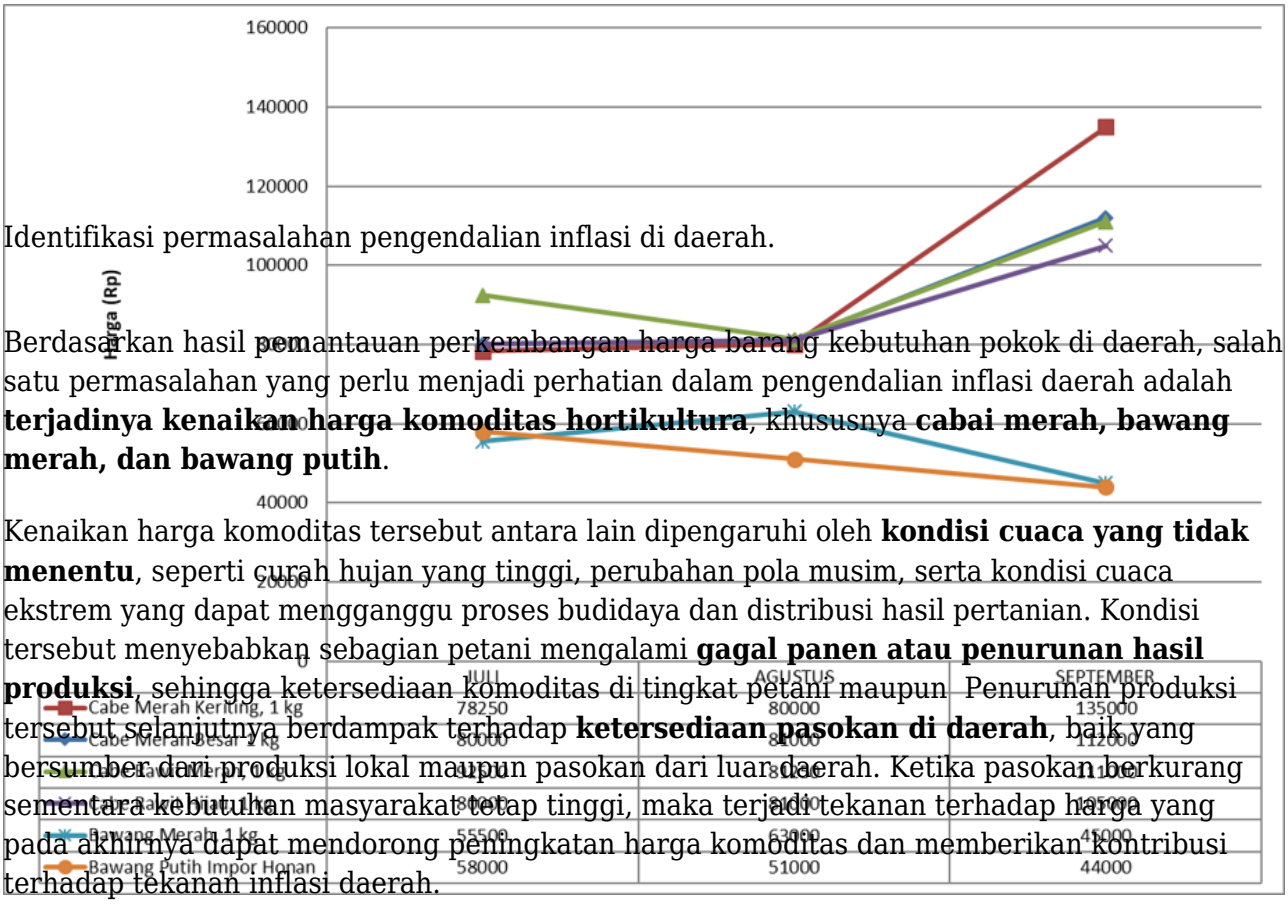
1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **Perkembangan dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, dan jasa serta risiko kedepan.**

    Keadaan triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut : untuk bahan pokok seperti beras dan gula pasir tidak mengalami kenaikan, harga beras (medium) harga masih sama Rp. 15.800 harga beras (premium) Rp. 16.900 per kg, sedangkan harga gula pasir Rp. 20.000 per kg, sementara untuk minyak goreng, mentega dan susu harga masih stabil, sedangkan daging ayam juga tidak mengalami kenaikan harga, harga masih di Rp.50.000 per kg. Untuk telur ayam mengalami kenaikan harga Rp. 30.500 per kg naik menjadi Rp. 68.000 atau naik sebesar Rp. 122,55&. Untuk bahan pokok dan barang penting lainnya seperti tepung terigu dan berbagai kacang-kacangan masih stabil, untuk bawang merah mengalami penurunan harga dari dari RP. 63.000 per kg turun menjadi Rp. 45.000 per kg, atau turun sebesar -28,57%, sedangkan bawang putih juga mengalami penurunan harga dari Rp. 51.000 per kg turun menjadi Rp.44.000 per kg atau turun sebesar -13,73%, untuk harga tomat mengalami penurunan harga dari harga Rp. 18.500 per kg turun menjadi Rp. 12.000 per kg, atau turun sebanyak -35,14% di sementara harga cabai rawit merah mengalami kenaikan harga dari harga Rp. 81.250 per kg naik menjadi Rp.111.000 per kg atau naik sebesar Rp. 36,62%, harga cabai merah besar mengalami kenaikan harga dari harga Rp. 81.250 per kg naik menjadi Rp.112.000 per kg atau naik sebesar Rp. 38,27%, untuk Cabe keriting juga mengalami kenaikan harga dari Rp. 80.000 naik menjadi Rp. 135.000 atau naik sebesar 68,75%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.



Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok di daerah, salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah adalah **terjadinya kenaikan harga komoditas hortikultura**, khususnya **cabai merah, bawang merah, dan bawang putih**.

Kenaikan harga komoditas tersebut antara lain dipengaruhi oleh **kondisi cuaca yang tidak menentu**, seperti curah hujan yang tinggi, perubahan pola musim, serta kondisi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu proses budidaya dan distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani mengalami **gagal panen atau penurunan hasil produksi**, sehingga ketersediaan komoditas di tingkat petani maupun Penurunan produksi tersebut selanjutnya berdampak terhadap **ketersediaan pasokan di daerah**, baik yang bersumber dari produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah. Ketika pasokan berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, maka terjadi tekanan terhadap harga yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan harga komoditas dan memberikan kontribusi terhadap tekanan inflasi daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah, TPID, pelaku usaha, petani, distributor, serta stakeholder terkait. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan komoditas strategis dapat terpenuhi secara berkesinambungan

Beberapa kebijakan dan langkah yang telah dilaksanakan antara lain: Optimalisasi Program Tol Laut, Optimalisasi fungsi dan peran Petani dalam menanam pasokan pangan lokal, Pelaksanaan dan monitoring evaluasi Harga dan ketersediaan pasokan, Fungsi dan peran TPID di Kab. Kepl. Sangihe, Pelaksanaan gerakan pangan murah, dan Penguatan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah,

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta kondisi pasokan komoditas pangan strategis. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan tekanan terhadap harga dan inflasi daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terutama pada tingkat distributor untuk mengetahui ketersediaan stok barang/bahan kebutuhan pokok, perkembangan harga, volume barang yang masuk dan keluar, serta pola dan jalur distribusinya. Pemantauan juga dilakukan terhadap distribusi barang melalui Gerai Maritim/Tol Laut, mulai dari barang yang masuk ke daerah sampai dengan proses penyalurannya kepada pedagang dan pengecer di kecamatan.

Selain pada sisi distribusi, evaluasi juga dilakukan terhadap rantai pasok komoditas hortikultura dan pangan lokal, mulai dari pusat produksi atau sentra pertanian, petani/produsen, pedagang pengumpul, distributor, hingga pasar-pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hambatan dalam rantai pasok yang dapat menyebabkan keterlambatan pasokan, berkurangnya ketersediaan barang, meningkatnya biaya distribusi, maupun kenaikan harga pada tingkat konsumen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan dan terus diperkuat antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran Gerai Maritim/Tol Laut dalam menjaga ketersediaan pasokan

Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan peran pedagang dan pelaku usaha yang

terlibat dalam Gerai Maritim/Tol Laut sebagai salah satu jalur utama distribusi barang kebutuhan pokok ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemantauan perlu dilakukan terhadap jadwal kedatangan, volume barang, jenis komoditas, harga distribusi, serta penyaluran barang sampai kepada pedagang dan pengecer di kecamatan.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pasokan yang masuk melalui Tol Laut dapat segera didistribusikan kepada masyarakat dan tidak terjadi hambatan distribusi yang dapat memicu kelangkaan maupun kenaikan harga.

2. Penguatan fungsi dan peran petani serta kelompok tani

Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan fungsi dan peran petani dan kelompok tani sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. Penguatan diarahkan terutama pada komoditas yang memiliki pengaruh terhadap inflasi, seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan komoditas hortikultura lainnya.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan, pengembangan sentra produksi, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Dengan meningkatnya produksi lokal, diharapkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dan sudah ada beberapa kecamatan yang melakukan panen cabai, sayur, tomat serentak ditengah cuaca Elnino yang terjadi. Dan dapat mengurangi pasokan dari luar daerah.

3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam mengantisipasi gangguan pasokan, kenaikan harga komoditas strategis, serta permasalahan distribusi.

Koordinasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dengan menyampaikan perkembangan harga, kondisi stok, kebutuhan komoditas, serta potensi risiko inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangan pasokan atau kenaikan harga yang signifikan, dapat segera dilakukan langkah intervensi dan dukungan dari tingkat provinsi maupun pusat.

4. Penguatan fungsi dan peran TPID Kabupaten

TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu terus dioptimalkan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi. TPID diharapkan tidak hanya berperan dalam monitoring dan evaluasi, tetapi juga mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan.

Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-OPD, pelaku usaha, distributor, petani, Bulog, perbankan, serta stakeholder terkait sehingga setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi.

5. Optimalisasi pemasaran hortikultura dan pangan lokal melalui digitalisasi

Salah satu langkah yang perlu terus dikembangkan adalah digitalisasi pemasaran hasil hortikultura dan pangan lokal. Pemanfaatan platform digital dapat mempertemukan petani

atau kelompok tani secara langsung dengan konsumen, pedagang, pelaku usaha, maupun pihak lain yang membutuhkan produk pertanian.

Melalui pemasaran berbasis digital, hasil produksi petani diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan terhadap pola pemasaran konvensional, serta meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Langkah ini juga dapat membantu memperpendek rantai pemasaran sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik dan konsumen mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif.

6. Pelibatan petani milenial dalam pemasaran digital

Pengembangan pemasaran digital perlu melibatkan petani milenial sebagai penggerak pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian. Petani milenial dapat diberikan pendampingan dalam penggunaan media sosial, marketplace, aplikasi pemasaran, promosi produk, pengemasan, hingga pengelolaan transaksi secara digital.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana pemasaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem pertanian dan penguatan ekosistem pangan lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

7. Penguatan kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan

Mengingat karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah kepulauan dan masih adanya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, maka perlu diperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dengan daerah-daerah sentra produksi. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada komoditas yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan, terutama cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas pangan strategis lainnya.

Kerja sama yang lebih terencana diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan dan mengurangi risiko terjadinya gejolak harga akibat keterlambatan atau kekurangan pasokan.

8. Penguatan sistem pemantauan harga dan stok secara berkala

Pemantauan harga dan stok perlu dilakukan secara rutin mulai dari tingkat produsen, distributor, pedagang, hingga pengecer di pasar-pasar tradisional. Data hasil pemantauan dapat menjadi dasar bagi TPID dalam menentukan langkah intervensi secara cepat.